

**MANFAAT DANA DESA DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI
DESA TLEKUNG KOTA BATU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Gelar Sarjana Administrasi Publik



Disusun Oleh:

TRESIA DUA SUSI

2018210073

**KONSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADewi
MALANG**

2022

RINGKASAN

Manfaat Dana Desa dalam Pengentasan kemiskinan di Desa Tlekung, Kota Batu dijalankan dengan berbagai program bantuan dari Dana Desa untuk masyarakat seperti BLT yang ditujukan untuk masyarakat sesuai kriteria yang ada, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) program yang dijalankan dengan menjalankan aktivitas atau kegiatan masyarakat seperti pembersihan dan lainnya, kemudian diberi dispensasi berupa uang. Adapun kendala atau faktor dalam hal ini ialah kurangnya komunikasi antar masyarakat bersama pemerintah desa.

Kata kunci: Dana Desa, Pengentasan Kemiskinan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah isu yang umumnya terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Meskipun demikian, tujuan utama perbaikan publik Indonesia adalah untuk meningkatkan kualitas moneter untuk menghasilkan pekerjaan dan memilah kehidupan yang unggul bagi semua individu, yang akan meningkatkan kemajuan dari masyarakat Indonesia melalui tujuan kemajuan publik, yaitu untuk mengurangi tingkat kebutuhan.

Kemiskinan tidak dapat dipisahkan dari kata kesusahan/kesukaran, tidak berdaya untuk mengatasi masalah, kurangnya edukasi, penyakit karena mereka tidak dapat menanggung biaya-biaya kesehatan, status lemah di mata publik, dan tidak memiliki dana untuk masa depan. Sejauh kebutuhan yang sebenarnya, keterpurukan tidak dapat dipisahkan dari tinggal di daerah pedesaan, pinggir pantai, dan rumah kumuh. Kemiskinan juga merupakan sulitnya orang untuk memenuhi keinginan dasar untuk kehidupan yang setimpal (BPS dan Depsos, 2003: 3)

Penurunan destitusi mencakup tingkat yang sangat luas, baik perspektif moneter, sosial, sosial dan politik. Keringanan keutuhan adalah salah satu upaya untuk menangani bantuan masing-masing pemerintah. Upaya untuk mengurangi persyaratan mendasar telah dilakukan sejak tiga puluh tahun terakhir, terutama dengan program perbaikan pemerintah termasuk rencana kebutuhan penting, misalnya, makanan, bantuan dan bimbingan pemerintah, perluasan peluang pekerjaan, pergantian kegiatan penghijauan, tindakan mengubah sumber daya yang berputar melalui sistem kredit, peningkatan pendirian dan bantuan, sterilisasi dan organisasi pertemuan berbagai usaha.

Pembangunan adalah kursus kemajuan yang menggabungkan semua kerangka kerja. Alasan mendasar untuk perbaikan itu sendiri adalah untuk bekerja pada bantuan pemerintah sosial dari daerah setempat melalui instruksi, kesejahteraan, dan administrasi yang berbeda sebagai jenis penguatan wilayah

lokal. Penguatan daerah berbasis kemajuan merupakan upaya untuk lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah.

Salah satu alasan kekurangan yang sering tidak diperiksa adalah kegagalan atau wabah covid. Virus Corona atau disebut juga dengan pandemi Covid, telah mengguncang dunia sejak akhir tahun 2019. Pandemi tersebut telah menyebar ke seluruh dunia dengan geologi wilayah yang sangat luas. Menjelang awal maret 2020, Covid masuk ke Indonesia dengan jumlah penyakit yang semakin meningkat dan pembagian wilayah yang tidak dapat disangkal, sehingga dilaporkan sebagai kegagalan publik yang aneh. Berbagai cara dijalani untuk mengurangi penyebaran atau upaya memutus mata rantai penyebaran Covid membuat berbagai praktik terkait uang bahkan menghentikan kreasi. Ini menghasilkan peningkatan pengangguran, pengurangan kecepatan kenyamanan individu dan asosiasi, dan mendukung peningkatan orang-orang baru yang tidak beruntung sekaligus meningkatkan jumlah orang yang tidak beruntung (Izzati 2020; Suryahadi et al. 2020).

Pada perkembangannya tersebut dilihat kurang memberi efek lebih bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data SUSENAS terakhir dilaksanakan oleh BPS di bulan maret tahun 2018 mencatat penduduk miskin di Indonesia berkisar 25,95 juta jiwa.

Dana Desa adalah amanat atau buah dari pengesahan UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa merupakan cadangan yang diperoleh dari penerimaan negara dan diharapkan menggunakan rencana keuangan desa yang digerakkan melalui rencana pembayaran dan pemanfaatan wilayah perkotaan serta digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, kemajuan pelaksanaan, perbaikan daerah, dan penguatan daerah.

Tentunya keberadaan Dana Desa adalah bagian dari usaha pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat melalui pengoptimalan potensi dari desa sehingga dapat menghidupi diri secara mandiri. Apabila dilihat langsung, tentunya sangat banyak masalah yang ditemui dalam mewujudkan DD dalam program pengentasan kemiskinan, seperti tidak

dilaksanakan sesuai peraturan, tanpa menyertakan masyarakat pada perencanaan dan SDM yang tidak sanggup menerima Dana Desa.

Berbagai prosedur pengurangan telah dilaksanakan, baik jangka panjang maupun proyek pendek. Program jangka panjang mendorong upaya untuk memberdayakan daerah setempat. Sementara itu, jangka pendek sebagian besar diselesaikan untuk membantu mereka memenuhi harapan mendasar untuk kehidupan sehari-hari. Berbagai kendala dialami dalam pelaksanaan prosedur pengurangan kemiskinan, didasari karena sosialisasi yang kurang baik bagi masyarakat lokal yang menjadi sasaran program maupun pelaksana program itu sendiri. Sebagian besar usaha tidak benar-benar mencakup lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, ada banyak keadaan di mana program sangat terkoordinasi, baik dalam kerangka pengembangan atau dalam berbagai target.

Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu merupakan kota yang sebagian besar penduduknya berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan, namun tingkat kemiskinan yang terjadi berfluktuasi secara luas, mulai dari yang termasuk dalam klasifikasi Keluarga Tidak Mampu (RTM). Keadaan kota Malang yang memiliki potensi luar biasa, daerah normalnya memiliki umur yang benar-benar bermanfaat. Sebagian dari pekerjaan pokok (RTM) mereka adalah buruh peternakan, peternak sapi perah dan peternak yang memiliki lahan sempit. Selain itu, potensi keuangan yang cukup menguntungkan adalah industri, namun hanya diklaim oleh sebagian orang, sebagian besar dari mereka mendapat kehidupan dari pemerintah kota. Dengan tujuan agar keadaan individu yang memiliki modal minim tidak merasakan potensi tersebut. Di desa Tlekung, sangat terlihat bahwa sebagian kepala keluarga memang menggantungkan hidupnya pada agribisnis (peternakan), beternak, dimana upah yang mereka peroleh tidak cukup untuk mengurangi taraf hidup keluarga mereka. Meski demikian, sebagian penduduk desa Tlekung adalah pegawai pemerintah dan buruh kantoran.

Jumlah penduduk di Kecamatan Junrejo berdasarkan evaluasi penduduk tahun 2020 sebanyak 56.721 jiwa, terdiri dari 28.514 jiwa laki-laki dan 28.207 jiwa perempuan. Dibandingkan dengan pertambahan penduduk pada tahun 2019, jumlah penduduk di Kecamatan Junrejo mengalami perkembangan sebesar 0,94 persen.

Sedangkan proporsi jenis kelamin pada tahun 2020 adalah penduduk laki-laki terhadap perempuan sebanyak 101. Dengan luas wilayah 30,68 kilometer persegi di Kecamatan Junrejo, tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Junrejo pada tahun 2020 adalah 1.796 km². Jika dibandingkan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2019, terjadi peningkatan sekitar 779 individu untuk setiap kilometer persegi (BPS: Kecamatan Junrejo tahun 2020 angka).

Dengan adanya Dana Desa ini diyakini dapat meringankan kemelaratan di desa melalui program yang dibiayai oleh Dana Desa misalnya, perbaikan kerangka kerja dan penguatan wilayah lokal yang benar-benar sesuai keinginan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa pada pengentasan kemiskinan ?
2. Apa saja faktor penghambat serta pendukung pada penggunaan dana desa dalam pengentasan kemiskinan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa dalam pengentasan kemiskinan.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dan pendukung pada pemanfaatan DD dalam penanggulangan kemiskinan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang pemanfaatan DD dalam penanggulangan kemiskinan di desa Tlekung Kota Batu Kecamatan Junrejo. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber data ataupun informasi mengenai kajian dari manfaat dana desa dalam pengentasan kemiskinan.

1.4.2 Bagi Desa Tlekung

Sebagai gambaran atau referensi bagi pemerintah desa untuk melakukan evaluasi dalam memanfaatkan dana desa dalam pengentasan kemiskinan.

1.4.3 Bagi Akademis

Sebagai media untuk memperdalam ilmu dalam menerapkannya, yang didapatkan selama masa kuliah terutama yang berkaitan dengan manfaat dana desa dalam pengentasan kemiskinan. Selain itu, untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan upaya perseptif terhadap kondisi di lapangan yang nanti akan ditemukan dalam kehidupan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bawono, Icuik Rangga dan Erwin Setyadi. 2019. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : PT. Grasindo.
- Bhinadi, Ardito. Oktober 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta : Deepublish.
- Nugroho, Riant. 2021. *Manajemen Keuangan Desa bagian 2: Perencanaan Keuangan Desa*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Samsudin, Harun. Dkk. 2019. *Kajian Sosial : Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Sumatera Selatan : Bappeda Litbang.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, Gunawan. dan Ari Wulandari. 2016. *Membangun Indonesia Dari Desa*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sunggono, Bagus. 2018. *Kecamatan Junrejo Dalam Angka 2018*. Batu: BPS Kota Batu.
- Yunus, Rabina dan Mansyur Radjah. November 2018. *Analisis Pengentasan kemiskinan*. Makassar : CV. Social Poilitic Genius(SIGn).

JURNAL

- Darmi, Titi dkk. 2019. *Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan*. Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS). Vol. 3 No. 1
- Gusti, Yeni dkk. 2020. *Pemanfaatan Dana Desa Dan Kaitannya Dengan Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Pesisir Selatan*. Jurnal ilmiah MEA (manajemen, ekonomi dan akuntansi). Vol. 4 No. 2
- Nuraini, Siti. Dkk. 2020. *Pelaksanaan Dana Desa Terhadap Penanggulangan Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 2

UNDANG-UNDANG

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.07/2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perincian Dana Desa Setiap Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat 6, Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Adalah Keseluruhan Kegiatan Yang Meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.